

# PENGARUH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PENGENDALIAN INTERN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

Da'ieva Arja Julia  
daievaarjajulia@gmail.com  
Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

## ABSTRACT

*This research aimed to examine and analyze the effect of local government accounting system, intern controlling, and information technology utilizing on accountability of government performance of Regional Revenue Office, East Java province, Surabaya. The research was quatitative. While, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 112 respondents as sample. The respondents were employees of Regional Revenue office, East Java province who distributed in 4 Surabaya Integrated Service unit. Moreover, the instrument in data collection technique used questionnaires. The questionnaires were distributed to respondents. However, there were 7 questionnaires which could not be taken as sample, since they had not been returned and broken. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded local government accounting system, intern controlling and information technology utilizing had positive and signifiant effect on accountability of government performance of Regional Revenue Office, East Java province, Surabaya. This showed, the employees were able to do their duties optimally. As consequence, its objectives, i.e. having accountability of government performance on the society, were accomplished. In short, all hypotheses had been approved.*

*Keywords: local government accounting system, intern controlling, information technology, accountability of government performance*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Responden yang digunakan adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya yang tersebar di 4 UPT PPD Surabaya. Sampel dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 112 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dari 112 kuesioner yang dibagikan terdapat 7 kuesioner yang gugur karena tidak kembali dan rusak. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap variabel akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya mampu melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat. Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini terbukti kebenarannya.

Kata Kunci: sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas kinerja pemerintah

## PENDAHULUAN

Terwujudnya pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, agar hal tersebut tercapai diperlukannya suatu media dan proses didalamnya. Salah satu aspek penting yang selalu menjadi pedoman suatu Negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

diantaranya dengan cara mewujudkan konsep akuntabilitas (Putri, 2015). Hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintahan di Indonesia menerapkan konsep akuntabilitas ini, khususnya dalam menjalankan serangkaian kegiatan administratif pemerintahan yang berfokus pada kinerja pemerintah. Hal ini diyakini dapat memberikan pelayanan publik secara baik untuk menuju suatu pemerintahan yang demokratis. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan sebuah wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui sistem media pertanggungjawaban secara periodik (Mardiasmo, 2009:20).

Menurut Zulharman (2015), sejak diberlakukannya intruksi presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas utama serta kewajiban mengelola sumber daya yang didasari atas rencana yang dilaksanakan oleh program serta berorientasi pada publik. Dengan ini publik akan memberikan dukungan kepada pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Oktaviani *et al.* (2017) dalam penelitiannya demi mencapai terwujudnya akuntabilitas kinerja yang baik tersebut diperlukan beberapa faktor yang berpengaruh salah satunya adalah sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD). Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah dan juga sebuah pedoman yang berisi kebijakan akuntansi pemerintah disusun untuk para petugas yang berkewajiban menjalankan fungsi akuntansi dengan baik dan benar (Fathia, 2017).

Penelitian yang dilakukan Afrina (2015), mengungkapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri No 13 tahun 2006 menjelaskan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pengetahuan tentang serangkaian proses pengumpulan data kemudian perekaman atau pencatatan data ke dokumen lalu pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah. Selain penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terdapat aspek lain dalam menunjang akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu diperlukannya unsur pengendalian intern. Unsur ini sangat penting untuk membantu mengendalikan semua komponen kegiatan yang ada didalam suatu pemerintahan daerah yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi. Jika dikendalikan dan tetap berjalan sesuai dengan visi misi yang telah rancang maka akan mencapai tujuan tertentu.

Menurut Afrina (2015) menyatakan pengendalian intern terdiri atas kebijakan atau prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan serta menjamin dipatuhinya hukum atau peraturan yang berlaku. Pengendalian intern juga merupakan suatu cara dalam mengarahkan, mengukur dan mengawasi sumber daya pemerintahan daerah yang dapat berfungsi untuk mengamankan aset, memeriksa kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi. Pengendalian intern juga dapat membantu mendeteksi suatu bentuk kecurangan yang dapat terjadi (*fraud*) serta melindungi aspek pemerintahan baik yang berwujud maupun tidak seperti reputasi. Hal ini telah tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 berkenaan dengan komponen atau unsur pengendalian intern yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang telah diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Diharapkan dengan menerapkannya SPIP pada pemerintah daerah dapat meminimalisir tingkat terjadinya penyimpangan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah serta

keseluruhan dari kegiatan yang ditetapkan agar berjalan dengan baik dan lancar (Chintya, 2015).

Disamping itu untuk mendukung terciptanya pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang diharapkan, terdapat variabel lain yang dapat menunjangnya yakni pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sudah menjadi hal yang sangat lazim dan tidak asing lagi tentunya dikalangan anggota sektor publik baik pemerintah maupun masyarakat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Demi mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan beraneka ragam manfaat yang dapat diperoleh salah satunya untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien (Putri, 2015). Bastian (2017) mengungkapkan pada dasarnya peran pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai alat bantu untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan posisi dalam suatu organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi menghasilkan akses yang mempercepat pembangunan nasional menjadi demokratis, berkelanjutan, dan memfasilitasi tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan maalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah? (2) Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah? (3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai barikut : (1) Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. (2) Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. (3) Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori stewardship pada hakekatnya dibangun atas dasar asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Munculnya teori ini dikarenakan situasi, dimana para manajer (pemerintah) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka yaitu demi kepentingan organisasi (masyarakat). Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan yang kolektif sesuai tujuan organisasi. Pada konteks organisasi sektor publik akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (steward) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (principal) dengan mengungkap segala informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik) sehingga teori stewardship dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik (Noor, 2015).

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan

kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, bertindak secara ekonomis dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards dapat menerapkan melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, serta menerapkan pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Djiloy, 2016).

### **Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas didalam akuntansi menurut Wikipedia bahasa Indonesia merupakan sebuah pertanggungjelasan. Artinya jika sebuah organisasi memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk berbagai kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil didalamnya maka organisasi tersebut dinyatakan akuntabel. Putri (2015) menyatakan Akuntabilitas dapat diartikan seperti konsep etika yang kerap berhubungan dengan administratif publik pemerintahan yang berada dilembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan yudikatif kehakiman. Konsep tersebut dapat dikatakan untuk dipertanggungjawabkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam memberikan jawaban atau tanggapan yang dapat dipersalahkan tetapi mempunyai keterikatan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek pemerintahan. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam memberikan kepuasan pelayanan pada publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Razi, 2017).

### **Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Akuntabilitas kinerja suatu pemerintah merupakan gambaran untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan visi misi guna mencapai sasarannya yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, dan kewajiban mengelola sumber daya yang didasari atas rencana atau program berorientasi pada publik serta dipertanggungjawabkan secara periodik, Razi (2017).

Menurut intruksi presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas utama serta kewajiban mengelola sumber daya yang didasari atas rencana yang dilaksanakan oleh program serta berorientasi pada publik. Publik akan memberikan dukungan kepada pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat akuntabel (Bastian, 2006).

### **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri No 13 tahun 2006 menjelaskan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pengetahuan tentang serangkaian proses pengumpulan data kemudian perekaman atau pencatatan data ke dokumen lalu penggolongan atau pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat diterapkan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer, Afrina (2015). Dalam penelitian Fathia (2017) SAPD juga merupakan serangkaian prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah dan sebuah pedoman atau sering disebut kebijakan akuntansi yang disusun unntuk para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi agar berjalan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya.

Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah ini menghasilkan informasi yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan-keputusan, tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan daerah (Zulharman, 2015). Perencanaan yang baik didukung oleh informasi yang memadai dan baik pula, maka dapat disimpulkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dapat menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja pada pemerintahan.

### **Pengendalian Intern**

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 berkenaan dengan komponen yang mengatur unsur pengendalian intern yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang telah diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Dalam penelitian Afrina (2015) kegiatan pengendalian intern merupakan hal yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dan diharapkan mampu untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan maupun sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan secara berkala, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Menurut Chintya (2015) menjelaskan teknologi merupakan cara memproses informasi dengan menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi pada lingkup pemerintah adalah perilaku atau sikap seseorang dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

### **Penelitian Terdahulu**

Nasir dan Oktari (2014) dengan penelitian berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan pada 55 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD kabupaten Kampar. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD kabupaten Kampar.

Ardianto (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan ketaatan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) pada SKPD kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) kabupaten Kuantan Singingi.

Afrina (2015) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Intern dan Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Obyek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan positif karena akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan dipengaruhi oleh penerapan sistem akuntansi pemerintah, pengendalian intern dan sistem pelaporan dengan nilai R square ( $R^2$ ) sebesar 63,5%.

Penelitian Chintya (2015) yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok) menjelaskan bahwa hasil pengujian hipotesis pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah di kota Solok. Begitu juga dengan hipotesis sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di kota Solok.

Zulharman (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD kota Pekanbaru karena, semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi pemerintah maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya. Pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD kota Pekanbaru karena, semakin tinggi tingkat pemahaman dan ketaatan pada peraturan perundangan maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya.

Putri (2015) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Obyek penelitian pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di SKPD kota Pekanbaru. Sedangkan, variabel ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di SKPD kota Pekanbaru.

Henry (2016) melakukan penelitian dengan judul *Exploring Information Technology: Why The Use Of Information Technology Governance Negatively Influences Revenue Performance*. Hasil penelitian ini mengemukakan bukti yang positif terkait tata kelola teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pendapatan pemerintahan di Negara bagian Inggris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendapatan pemerintah.

Oktaviani *et al.* (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kuantan Singingi.

Razi (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan,

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan ketaatan terhadap perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif secara bersama sama terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD kabupaten Indragiri Hulu.

Fathia (2017) juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus SKPD di Provinsi Riau). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja dan pengendalian akuntansi secara simultan (bersama sama) menunjukkan hasil yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Provinsi Riau.

Mubaraq (2017) melakukan penelitian berjudul Ketaatan pada Perundang-undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketaatan pada perundang-undangan dan Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Instansi Pemerintah Daerah di kota Bukittinggi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Instansi Pemerintah Daerah di kota Bukittinggi.

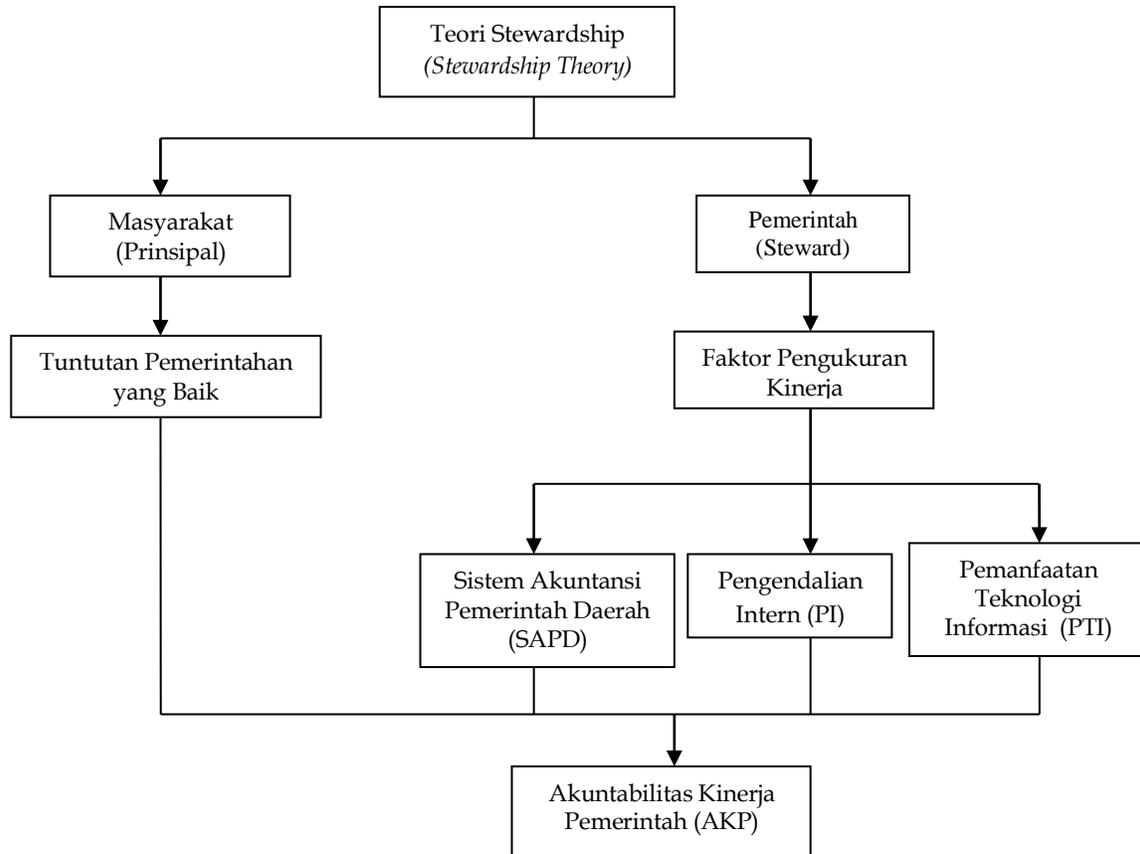
Abba dan Kakanda (2017) melakukan penelitian dengan judul *Moderating Effect Of Internal Control System On The Relationship Between Government Revenue And Expenditure*. Obyek penelitian ini adalah Negara bagian Taraba, Nigeria. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi hubungan antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dapat meningkatkan dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah di Negara bagian Taraba, Nigeria.

Manullang dan Abdullah (2019) juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pergantian Kepala SKPD terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah SKPD Provinsi Sumatera. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Provinsi Sumatera. Sedangkan Pergantian Kepala SKPD berpengaruh secara negatif terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD Provinsi Sumatera.

Mussari dan Sorrentino (2017) melakukan penelitian dengan judul *Italian Public Sector Accounting Reform: Step Towards Harmonisation Of European Public Sector Accounting Performance*. Obyek penelitian ini dilakukan pada Negara bagian Eropa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi sistem akuntansi sektor publik di eropa mendukung secara keseluruhan dalam kinerja manajerial sektor publik. Demikian dapat diartikan bahwa sistem akuntansi sektor publik secara signifikan mempengaruhi kinerja manajerial sektor publik di eropa.

## Rerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah di jelaskan dan diuraikan diatas, maka dapat disusun berupa kerangka pemikiran yaitu pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi inormasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, sebagai berikut:



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

## Pengembangan Hipotesis

### Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan cara mengoperasikan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi. SAPD dapat dinyatakan sebagai sebuah pedoman yang disusun agar para petugas yang menjalankan akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang dilakukan dengan benar maka akan menyajikan pertanggungjawaban laporan keuangan yang benar sesuai dengan yang telah ditentukan dan akan berpengaruh positif terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatmala (2014), Afriani (2015), dan Zulharman (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathi (2017) dan Oktaviani *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Lumenta (2016) menunjukkan hasil yang secara parsial berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengujian ini menunjukkan pelaksanaan evaluasi penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka mengatasi hambatan dan kendala yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaannya merupakan hal yang berpengaruh dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

### **Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Pengendalian intern merupakan cara dalam mengarahkan, mengukur dan mengawasi sumber daya pemerintahan daerah yang dapat berfungsi untuk mengamankan aset, memeriksa kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, mendeteksi suatu bentuk kecurangan yang dapat terjadi (*fraud*) serta melindungi aspek pemerintahan baik yang berwujud maupun tidak. Pengendalian Intern yang baik dalam suatu pemerintahan akan menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberi keyakinan bagi pemerintah bahwa kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan tolak ukur dan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien akan memberikan dampak positif bagi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dalam penelitian Nasir dan Oktari (2014), Afrina (2015), Chintya (2015) mengungkapkan bahwa pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Serta mengacu pada penelitian Manullang dan Abdullah (2019) juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sedangkan Penelitian dari Saputra (2018) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian tersebut penulis merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

### **Pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja pemerintah**

Pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi karena dengan memanfaatkannya dapat membantu mengelolah data yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Pada dasarnya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat menghasilkan akses yang mempercepat pembangunan nasional menjadi lebih demokratis, berkelanjutan, dan memfasilitasi tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera. Salah satu manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nasir dan Oktari (2014), Arfdianto (2014), Putri (2015) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Chintya (2015) dan Razi (2017) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mubaraq (2017) menunjukkan hasil sebaliknya yaitu berpengaruh negatif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penelitian tersebut penulis merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H<sub>3</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)**

Jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menganalisis data berbentuk angka yang dikaitkan dengan statistik, tabel dan grafik. Setelah itu melakukan riset untuk menguji dan meneliti kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2018). Metode penelitian ini adalah metode penelitian kausal komporatif yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan pengaruh antara variabel bebas dan terikat. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah umum yang terdiri atas obyek/subyek dan memiliki karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya yang terbagi pada empat Unit Pelayanan Teknis (UPT).

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana penulis memiliki beberapa kriteria khusus dalam proses penentuan sampel dan dinilai paling baik untuk dijadikan sampel penelitian. Adapun kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini, yaitu semua pegawai yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya di 4 (empat) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Utara, dan Surabaya Barat, pegawai yang berpengalaman masa kerja minimal 5 tahun di bidang pekerjaan yang tetap, pegawai yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang memiliki jabatan minimal golongan III(Tiga) atau minimal telah menempuh pendidikan formal D4 atau setara S1. Dengan beberapa kriteria yang ditetapkan maka sampel yang digunakan sebanyak 112 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian yang telah dipilih (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari metode *survey*, metode ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner yang berisikan daftar-daftar pernyataan yang terstruktur kepada responden yang telah ditetapkan oleh peneliti.

## **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

### **Variabel Independen**

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependen) dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel independen yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Pengendalian Intern (PI), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI).

Pertama variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan serangkaian proses pengumpulan data kemudian perekaman atau pencatatan data ke dokumen lalu pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan dapat diterapkan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer (Fatmala, 2014).

Kedua variabel Pengendalian Intern (PI) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 kegiatan pengendalian intern merupakan hal yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai. Hal ini diharapkan mampu untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Chintya, 2015).

Ketiga variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mewajibkan pemerintah melakukan pemanfaatan teknologi informasi yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja pemerintah. Sasaran pengguna teknologi informasi ditujukan ke semua orang tanpa terkecuali karena semakin banyak pengguna yang dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong suatu perubahan sosial dan ekonomi yang positif di dalam kehidupan (Razi, 2017).

### Variabel Dependen

Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel dependen. Variabel dependen yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKP). Akuntabilitas kinerja suatu pemerintah merupakan gambaran untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan visi misi guna mencapai sasarannya yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik (Razi, 2017).

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Jumlah item Pertanyaan
SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) Oktaviani <i>et al.</i> (2017)	1. Pencatatan	2
	2. Penggolongan	2
	3. Pelaporan	2
PI (Pengendalian Intern) Chintya (2015)	1. Lingkungan Pengendalian	2
	2. Penilaian Resiko	1
	3. Kegiatan Pengendalian	1
	4. Informasi dan Komunikasi	1
	5. Pemantauan Pengendalian Internal	1
PTI (Pemanfaatan Teknologi Informasi) Chintya (2015)	1. Intensitas Pemanfaatan	4
	2. Frekuensi Pemanfaatan	2
	3. Jumlah Aplikasi atau Perangkat Lunak	3
AKP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Oktaviani <i>et al.</i> (2017)	1. <i>Input</i> (Penetapan Kinerja)	4
	2. <i>Process</i> (Pelaksanaan)	3
	3. <i>Output</i> (Pencapaian Kinerja)	3
	4. <i>Outcome</i> (Hasil Kinerja)	4
	5. <i>Benefit</i> (Manfaat Informasi Kinerja)	3
	6. <i>Impact</i> (Dampak)	1

### Teknik Analisis Data

#### Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah pengujian yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi terkait karakteristik variabel penelitian dan daftar demografi responden. Daftar demografi tersebut dapat berupa penjabaran jenis kelamin, usia, masa kerja, pendidikan terakhir, dan hal lain sebagainya. Statistik deskriptif juga memberikan deskripsi atau gambaran tentang ringkasan data-data penelitian seperti rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, modus, maksimum, minimum, dan lain-lain (Sugiyono, 2018:35-36).

## Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menunjukkan kevalidan yang dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam metode *pearson correlation* akan dikatakan valid jika korelasi skor tiap butir pertanyaan dengan tiap konstruksinya berada pada nilai signifikansi 0,05. Sehingga, jika  $\text{sig} > (\alpha) 0,05$  maka butir atau variabel tersebut tidak valid. Jika  $\text{sig} < (\alpha) 0,05$  maka butir atau variabel tersebut valid; Jika  $\text{sig} = 0,05$  maka butir atau variabel tersebut valid. Besarnya  $r$  dapat dihitung dengan menggunakan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ditujukan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur indikator atau instrumen kuesioner dengan stabil dan konsisten. Menurut Ghozali (2016), mengungkapkan jika uji reliabilitas menggunakan cronach alpha  $> 0,60$  maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel.

## Uji Kelayakan Model

### Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Ghozali (2016) mengungkapkan bahwa uji Koefisien Determinasi (Uji  $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0(nol) dan 1(satu). Jika variabel  $R^2$  menunjukkan nilai angka yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen mengalami keterbatasan, sedangkan jika  $R^2$  menunjukkan nilai 1atau mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

### Uji F (*Goodness of Fit*)

Ghozali (2016) mengungkapkan bahwa uji Statistik F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian. Dimana menunjukkan adanya pengaruh nyata atau tidak antara koefisien variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F memiliki tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 5% atau 0,05. Kriteria pengujiannya antara lain jika  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  atau signifikan 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak dan dapat dipergunakan pada analisis berikutnya.

## Analisis Regresi Linier Berganda

Perumusan regresi linear berganda yang menjadi model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{AKP} = \alpha + \beta_1 \text{SAPD1} + \beta_2 \text{PI2} + \beta_3 \text{PTI3} + e$$

Keterangan:

AKP : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

SAPD1 : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

PI2 : Pengendalian Intern

PTI3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi

$e$  : Standar Error

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Ghozali (2016) Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok data atau variabel dependen dan variabel independen yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui dua metode. Pertama dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* (KS) yang telah ditapkan nilai KS nya lebih besar atau sama dengan 0,05 maka data tersebut dikatakan normal. Dan yang kedua *Normal Probability Plot* atau pendekatan grafis, jika penyebaran data (titik) berada disekitar sumbu diagonal dan membentuk garis diagonal, maka dapat dikatakan odel regresi memenuhi asusmsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Ghozali (2016) menjelaskan uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi dan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi yang tinggi antar variabel independen. Dalam uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat *VIF* (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika  $VIF > 10$  dan nilai *Tolerance*  $< 0,10$  maka dapat dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas dan begitu pula sebaliknya.

### Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi (*varians*) dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan 2 metode yaitu melakukan uji glejser dan melalui grafik plot (*Scatterplot*). Uji glejser dapat menjelaskan nilai absolute residual atau nilai sisa terhadap variabel independen, dengan nilai signifikan  $> 0,05$  atau taraf tingkat kepercayaan diatas 5%. Metode kedua dapat diketahui melalui grafik plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residual (SRESID). Jika titik - titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

### Uji t (Uji Statistik)

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa uji t (t-test) pada umumnya dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dengan kriteria pengujiannya antara lain jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau signifikan 0,05 maka hipotesis diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau signifikan 0,05 maka hipotesis ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

Pengujian stastistik deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam tabel 2. Berdasarkan tabel 2, dapat dijelaskan bahwa variabel sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) menunjukkan nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 5, serta rata-rata 3,82 dan standart deviation 0,434. Artinya, memiliki nilai terendah dari jawaban responden adalah 3 atau dinyatakan ragu - ragu, serta nilai tertinggi dari jawaban responden adalah 5 atau dinyatakan Sangat Setuju, dan rata-rata jawaban responden bernilai 3,82 atau dinyatakan ragu - ragu Cenderung Setuju dengan tingkat standart devisiasi sebesar 4,34% yang mana hasil data dinyatakan kurang bervariasi karena standart devisiasi  $< \text{mean}$ .

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Stastistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAPD	105	3	5	3.82	0,434
PI	105	4	5	4.28	0,344
PTI	105	4	5	4.23	0,350
AKP	105	4	5	4.24	0,292
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Variabel pengendalian intern (PI) menunjukkan nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 5, serta rata-rata 4,28 dan standart deviation 0,344. Artinya, pengendalian intern memiliki nilai terendah dari jawaban responden adalah 4 atau dinyatakan Setuju, serta nilai tertinggi dari jawaban responden adalah 5 atau dinyatakan Sangat Setuju, dan rata-rata jawaban responden bernilai 4,28 atau dinyatakan setuju cenderung sangat setuju dengan tingkat standart devisiasi sebesar 3,44% yang mana hasil data dinyatakan kurang bervariasi karena standart devisiasi < mean.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi (PTI) menunjukkan nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 5, serta rata-rata 4,23 dan standart deviation 0,350. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai terendah dari jawaban responden adalah 4 atau dinyatakan setuju, serta nilai tertinggi dari jawaban responden adalah 5 atau dinyatakan sangat Setuju, dan rata-rata jawaban responden bernilai 4,23 atau dinyatakan setuju dengan tingkat standart devisiasi sebesar 3,50% yang mana hasil data dinyatakan kurang bervariasi karena standart devisiasi < mean.

Variabel akuntabilitas kinerja pemerintah (AKP) menunjukkan nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 5, serta rata-rata 4,24 dan standart deviation 0,292. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai terendah dari jawaban responden adalah 4 atau dinyatakan setuju, serta nilai tertinggi dari jawaban responden adalah 5 atau dinyatakan sangat Setuju, dan rata-rata jawaban responden bernilai 4,24 atau dinyatakan setuju dengan tingkat standart devisiasi sebesar 2,92% yang mana hasil data dinyatakan kurang bervariasi karena standart devisiasi < mean.

## Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

Dalam metode *pearson correlation* akan dikatakan valid jika korelasi skor tiap butir pertanyaan dengan tiap konstruknya berada pada nilai signifikansi 0,05. Sehingga, jika  $\text{sig} > (\alpha)$  0,05 maka butir atau variabel tersebut tidak valid. Jika  $\text{sig} < (\alpha)$  0,05 maka butir atau variabel tersebut valid; Jika  $\text{sig} = 0,05$  maka butir atau variabel tersebut valid. Besarnya r dapat dihitung dengan menggunakan taraf signifikasi ( $\alpha$ ) sebesar 5%.

Hasil r tabel didapatkan dari tabel nilai product moment dengan perolehan sebagai berikut:

$$df = n - 2$$

$$df = 105 \text{ responden} - 2$$

$$df = 103 \text{ responden} \rightarrow r \text{ tabel adalah } 0,1918$$

Berdasarkan Tabel 3 yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan yang diajukan kepada responden memiliki nilai r hitung  $\geq$  r tabel (uji 2 sisi dengan tingkat signifikan < 0,05), sehingga instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi terhadap skor total (dinyatakan valid).

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas**  
**Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Variabel	Item Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Signifikan	Keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	SAPD1	0,619	0,1918	0,000	VALID
	SAPD2	0,711	0,1918	0,000	VALID
	SAPD3	0,414	0,1918	0,000	VALID
	SAPD4	0,593	0,1918	0,000	VALID
	SAPD5	0,619	0,1918	0,000	VALID
	SAPD6	0,647	0,1918	0,000	VALID
Pengendalian Intern	PI1	0,471	0,1918	0,000	VALID
	PI2	0,514	0,1918	0,000	VALID
	PI3	0,755	0,1918	0,000	VALID
	PI4	0,755	0,1918	0,000	VALID
	PI5	0,818	0,1918	0,000	VALID
	PI6	0,462	0,1918	0,000	VALID
Pemanfaatan Teknologi Informasi	PI1	0,372	0,1918	0,000	VALID
	PI2	0,727	0,1918	0,000	VALID
	PI3	0,585	0,1918	0,000	VALID
	PI4	0,612	0,1918	0,000	VALID
	PI5	0,518	0,1918	0,000	VALID
	PI6	0,727	0,1918	0,000	VALID
	PI7	0,419	0,1918	0,000	VALID
	PI8	0,589	0,1918	0,000	VALID
	PI9	0,339	0,1918	0,000	VALID
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	AKP1	0,725	0,1918	0,000	VALID
	AKP2	0,733	0,1918	0,000	VALID
	AKP3	0,501	0,1918	0,000	VALID
	AKP4	0,576	0,1918	0,000	VALID
	AKP5	0,703	0,1918	0,000	VALID
	AKP6	0,726	0,1918	0,000	VALID
	AKP7	0,501	0,1918	0,000	VALID
	AKP8	0,576	0,1918	0,000	VALID
	AKP9	0,725	0,1918	0,000	VALID
	AKP10	0,733	0,1918	0,000	VALID
	AKP11	0,501	0,1918	0,000	VALID
	AKP12	0,576	0,1918	0,000	VALID
	AKP13	0,703	0,1918	0,000	VALID
	AKP14	0,726	0,1918	0,000	VALID
	AKP15	0,399	0,1918	0,000	VALID
	AKP16	0,725	0,1918	0,000	VALID
	AKP17	0,733	0,1918	0,000	VALID
	AKP18	0,501	0,1918	0,000	VALID

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) > 0,60, maka dapat diuraikan pada tabel 4. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel mempunyai *cronbach's alpha* diatas 0,60, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari kuesioner yang diberikan kepada responden adalah reliabel dan konsisten.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Alpha ( $\alpha$ )	Keterangan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0,719	0,60	RELIABEL
Pengendalian Intern	0,730	0,60	RELIABEL
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,715	0,60	RELIABEL
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	0,662	0,60	RELIABEL

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

### Uji Kelayakan Model

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0(nol) dan 1(satu). Berdasarkan uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi antara sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah ditunjukkan oleh nilai *adjusted R Square* yaitu sebesar 0.976, yang artinya bahwa semua variabel independen memiliki kontribusi sebesar 97,6% terhadap variabel dependent. Dengan demikian hasil pengujian koefisien determinasi ini dapat disimpulkan tergolong sangat kuat, dan sebagian besar diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini sebesar 2,4%.

#### Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji kelayakan model penelitian yakni, apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan data yang diperoleh dari uji f dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 1,405 dengan tingkat signifikan 0,000, maka model yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan. Hal ini dikarenakan nilai  $F_{tabel} = N - 3 - 1$  atau dalam penelitian ini menjadi  $F_{tabel} = 105 \text{ responden} - 3 \text{ variabel} - 1 = 101$  dengan taraf signifikan alpha ( $\alpha$ ) sebesar 5% (uji 2 arah), maka akan menghasilkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,69. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F hitung <  $F_{tabel}$  yakni  $F_{hitung} 1,405 < F_{tabel} 2,69$ .

#### Analisis Regresi Liner Berganda

Dari data yang diterima oleh responden dan diproses dengan SPSS versi 16, diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda yang menjadi model penelitian ini adalah  
 $AKP = 3,613 + 1,662 \text{ SAPD} + 0,699 \text{ PI} + 0,335 \text{ PTI} + e$

Koefisien pada variabel sistem akuntansi pemerintah daerah adalah 3,613 yang artinya memberikan pengaruh hubungan yang searah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa jika sistem akuntansi pemerintah daerah yang dimiliki tinggi maka akuntabilitas kinerja pemerintah juga akan tinggi. Hasil koefisien variabel pengendalian intern yaitu 1,662 dapat diartikan memberikan pengaruh hubungan searah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, yang artinya jika pengendalian intern yang dimiliki tinggi maka akuntabilitas kinerja pemerintah juga akan tinggi dan terakhir koefisien variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu 0,335 yang artinya memberikan pengaruh yang searah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkat pula akuntabilitas kinerja pemerintah.

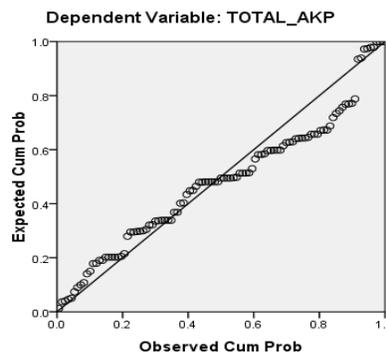
### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan dua metode, yang pertama menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Berdasarkan pengujian uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,973 atau *Sig total variabel* > 0,05. Artinya data tersebut berdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas residual *Kolmogorov-Smirnov*, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Metode kedua dengan pendekatan grafik atau *Normal Probability Plot*. Dibawah ini hasil dari uji normalitas menggunakan metode pendekatan grafik atau *Normal P-P Plot Regression Standardized* sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2

Normal P-P of Regression Standardized

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan pada gambar *Normal P-P Plot Regression Standardized* diatas dapat dilihat bahwa titik - titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, yang artinya dapat dikatakan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Multikolinearitas

Dibawah ini adalah hasil dari uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 5  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	KETEREANGAN
SAPD 1	0,465	2,153	NON MULTIKOLINIERITAS
PI 2	0,162	6,182	NON MULTIKOLINIERITAS
PTI 3	0,135	7,425	NON MULTIKOLINIERITAS

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai VIF Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Pengendalian Intern (PI) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau korelasi antara variabel-variabel independen.

#### Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan dua metode, yang pertama menggunakan uji glejser. Dibawah ini hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser

sebagai berikut:

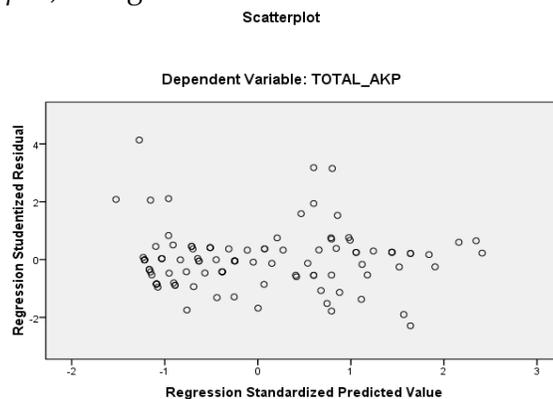
**Tabel 6**  
**Hasil Uji Glejser**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	0,517	0,779		0,663	0,509
SAPD	-0,134	0,042	-0,435	-3,173	0,102
PI	-0,011	0,066	-0,040	-0,173	0,863
PTI	0,098	0,047	0,525	2,062	0,052

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 6 diatas pada hasil uji glejser tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $> 0,05$  atau diatas nilai kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Metode kedua dalam uji heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan grafik (*Scatterplot*). Dibawah ini hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan metode pendekatan grafik (*Scatterplot*) sebagai berikut:



**Gambar 3**

**Grafik Scatterplot**

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas menunjukkan bawa tidak ada pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas serta dapat dikatakan memenuhi uji asumsi heteroskedastisitas.

### Uji t (Uji Statistik)

Hasil uji statistik (uji t) dapat dilihat perhitungan statistiknya pada tabel berikut ini:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t**

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	P-Value	Keterangan
SAPD terhadap AKP	26,943	1,984	0,000	0,050	Berpengaruh
PI terhadap AKP	7,271	1,984	0,000	0,050	Berpengaruh
PTI terhadap AKP	4,846	1,984	0,000	0,050	Berpengaruh

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa variabel independen sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap

variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah, sebagai berikut:

Hipotesis 1 adalah pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKP), dengan nilai  $t_{hitung} 26,943 > t_{tabel} 1,984$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,050$ , sehingga  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKP). Hipotesis 2 adalah pengaruh Pengendalian Intern (PI) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKP), dengan nilai  $t_{hitung} 7,271 > t_{tabel} 1,984$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,050$ , sehingga  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Intern (PI) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKP). Hipotesis 3 adalah pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKP), dengan nilai  $t_{hitung} 4,864 > t_{tabel} 1,984$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,050$ , sehingga  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKP).

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Berdasarkan penelitian dan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai  $t$  tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,050$  sehingga  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKP) di Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Kota Surabaya. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh Afrina (2015), Zulharman (2015), Fathia (2017), dan Oktaviani *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian penelitian ini menyatakan bahwa, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (AKP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas profesionalnya, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang dapat dihasilkan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan penjelasan teori stewardship yang mana organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik), sehingga dapat terciptanya tatanan pemerintahan yang baik.

### **Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Berdasarkan penelitian dan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai  $t$  tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,050$  sehingga  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, variabel Pengendalian Intern (PI2) berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKP) di Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Kota Surabaya. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nasir&Oktari (2014), Afrina (2015), Chintya (2015), dan Manullang&Abdullah (2019) yang mengungkapkan bahwa penerapan pengendalian intern di ruang lingkup instansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian penelitian ini menyatakan bahwa, pengendalian intern (PI) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (AKP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menjelaskan semakin tinggi pengendalian intern yang dimiliki dan diterapkan oleh pegawai yang bekerja pada BAPENDA JATIM Kota Surabaya dalam membantu

pelaksanaan tugas pemerintah maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran akan akuntabilitas pemerintahan khususnya kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang menjelaskan bahwa steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerjanya atau disebut juga sebagai bukti akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, sehingga dengan demikian fungsi pemerintahan akan optimal.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akutabilitas Kinerja Pemerintah**

Berdasarkan penelitian dan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai  $t$  tabel sebesar 1,984 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,050$  sehingga  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI3) berpengaruh positif terhadap variabel Akutabilitas Kinerja Pemerintah (AKP) di Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Kota Surabaya. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh Chintya (2015), Putri (2015), dan Razi (2017) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara optimal berpengaruh positif dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian penelitian ini menyatakan bahwa, pemanfaatan teknologi informasi (PTI) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (AKP) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya. Hasil ini menjelaskan semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pegawai yang bekerja pada BAPENDA JATIM Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas operasionalnya sehari - hari dapat berperan dalam memenuhi kewajiban akan kepada masyarakat. Sehingga pemerintah dengan lebih mudah dan efisien memberikan layanan kepada masyarakat dan mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang semakin baik. Hal ini sejalan dengan implikasi teori stewardship yang menjelaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus dapat bertindak secara ekonomis dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akutabilitas Kinerja Pemerintah yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota dapat tarik beberapa simpulan. Pertama, pada penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berpengaruh signifikan positif terhadap Akutabilitas Kinerja Pemerintah (AKP) yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas profesionalnya akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja yang dihasilkan pemerintah. Kedua, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Pengendalian Intern (PI) berpengaruh signifikan positif terhadap Akutabilitas Kinerja Pemerintah (AKP) yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya. Dengan demikian menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian intern yang dimiliki dan dilakukan oleh pegawai yang bekerja pada BAPENDA JATIM Kota Surabaya, akan semakin membantu dalam pelaksanaan kinerja pemerintah. Ketiga, hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) berpengaruh signifikan positif terhadap Akutabilitas Kinerja Pemerintah (AKP) yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kota Surabaya. Hal

ini terjadi dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintahan, khususnya BAPENDA JATIM Kota Surabaya pada era yang sangat maju saat ini merupakan hal yang sangat berperan dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari. Oleh sebab itu, dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dapat berpengaruh dalam memberikan kewajiban akan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada masyarakat.

### Saran

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga ada beberapa keterbatasan dalam menguji penelitian ini. Keterbatasan tersebut dapat diuraikan diantaranya, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data primer, yaitu pengumpulan datanya hanya dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Selanjutnya pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner pada suatu instansi tidak dapat secara langsung diisi oleh responden pada saat itu juga, jadi untuk mendapatkan data kuesioner diperlukan waktu yang tidak singkat. Dengan demikian hal tersebut juga dapat mempengaruhi hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan penelitian ini hanya mengambil objek di wilayah Kota Surabaya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, dari total 29 Kabupaten dan 9 Kota yang termasuk di dalamnya. Sehingga penelitian ini tidak menggambarkan secara menyeluruh wilayah terkait pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan saran pengembangan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Saran tersebut diantaranya sebagai berikut , Pertama bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya diharapkan agar selalu memperhatikan sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, sehingga pertanggungjawaban pemerintah sebagai pihak yang memenuhi kewajiban dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Kedua bagi peneliti selanjutnya disarankan meneliti variabel independen lainnya diluar variabel yang digunakan pada penelitian ini, seperti motivasi kerja, sistem pelaporan kinerja, ketaatan pada peraturan perundangan dan lain-lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian dapat menambah variasi dalam penelitian. Ketiga bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih objek penelitian atau instansi pemerintah lain yang berbeda dari penelitian ini, sehingga dapat memperluas penelitian dan memberikan temuan empiris terbaru di masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abba, M. dan M. M. Kakanda. 2017. Moderating Effect of Internal Control System on The Relationship Between Government Revenue and Expenditure. *Assian Economic and Financial Journal* 7(4): 381-392.
- Afrina, D. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Ekonomi* 2(2):1-15.
- Ardianto, R. 2014. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi* 2(2): 197-209.
- Bastian, I. 2017. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.

- Chintya, I. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok. *Jurnal Fakultas Ekonomi* 3(1).
- Djiloy, N. L. 2016. Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. *Jurnal Katalogis* 4(6): 70-82.
- Donaldson, L. and J. H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*.
- Fathia, N. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP): Studi Kasus SKPD di Provinsi Riau. *Jurnal Fakultas Ekonomi* 4(1).
- Fatmala, J. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi kasus pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah. *Skripsi*. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Henry, M. 2016. Exploring Information Technology: Why The Use of Information Technology Influences Revenue Performance. *Assian Economic and Financial Journal* 8(2): 159-173.
- Instrumen Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. 15 Juni 1999. Jakarta.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Manullag, S. B. dan S. Abdullah. 2019. Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pergantian Kepala SKPD terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4(1): 62-73.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Mubaraq, H. 2017. Pengaruh Ketaatan pada Perundang-undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Mussari, R. dan D. Sorrentino. 2017. Italian Public Sector Accounting Reform: Step towards Harmonisation of European Public Sector Accounting Performance. *Account Econ Law Journal* 7(2): 137-153.
- Nasir, A. dan R. Oktari. 2014, Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, Riau. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Oktavani, S., Diskhamarzeweny, dan Y. E. Yulis. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah* 4(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. 27 Agustus 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110.
- Putri, E. M. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP): Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Solok. *Jurnal Ekonomi* 3(1).
- Razi, R. F. 2017. Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP): Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Ekonomi* 2(2).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung.
- Teryima, S. J. dan A. Sunday. 2015. The role of information communication technology (ICT) in enhancing productivity in local government administration in Benue State, Nigeria. *The Business and Management Journal* 6(2).
- Zodia, A. P. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi* 2(2).
- Zulharman, K. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Ekonomi* 2(2).